

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Program intensifikasi telah dicoba oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937. Meskipun dalam wadah dan nama yang berbeda-beda program ini tetap bertujuan meningkatkan kemampuan produksi pertanian padi. Pelaksanaan *Revolusi Hijau* di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960an. Pelaksanaan program pembangunan pertanian pada tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pada tanaman pangan. Logika pembangunan pertanian pada waktu tersebut adalah peningkatan hasil produksi pertanian, walaupun masalah pembagian hasil nantinya akan diatur oleh mekanisme pasar (Yulianti Yayuk:2003:23).

Sektor pertanian adalah satu diantara beberapa komoditas strategis. Sektor strategis pertanian di Desa Selomartani dapat dilihat dari mayoritas penggunaan lahan subur atau lahan produktifnya untuk lahan pertanian. Tingkat konsumsi masyarakat desa Selomartani pada umumnya yang menggunakan bahan dasar beras sebagai bahan makanan pokok merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya sektor pertanian di wilayah tersebut.

Tidak lepas dari masalah kebutuhan pokok akan pangan, menurut penulis pembangunan pertanian di Desa Selomartani selalu dihadapkan dengan

beberapa masalah yang sangat dilematis, yaitu masalah proses produksi dan masalah pasca produksi. Masalah pasca produksi adalah masalah ketika petani dihadapkan dengan tuntutan akan peningkatan hasil produksi dan tuntutan peningkatan pendapatan dari hasil pertaniannya. Sedangkan masalah proses produksinya adalah ketika petani menerapkan sistem pertanian mereka terkendala pada mahalanya biaya produksi.

Peningkatan produksi pertanian belum tentu mewujudkan produktifitas pertanian. Hasil produksi pertanian yang melimpah belum menjadi penjamin peningkatan pendapatan petani. Penyebabnya adalah dalam pasca produksi pertanian mekanisme pasar dan penetapan harga dasar produksi pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan petani karena penetapan harga dasar yang cukup rendah. Di samping itu permainan pasar pertanian masih dikuasai oleh tengkulak baik lokal atau luar daerah.

Korelasi masalah proses produksi dan pasca produksi adalah pada saat keuntungan dari hasil penjualan produksi pertanian tidak mampu menopang biaya produksi selanjutnya, padahal keuntungan tersebut merupakan modal yang sangat penting bagi petani. Berbagai kendala yang ada dalam proses produksi maupun pasca produksi menyebabkan sebagian besar petani yang hidup dalam kelas ekonomi menengah kebawah mengalami kelemahan modal. Kelemahan modal ini jelas akan mempengaruhi proses produksi serta pasca produksi petani.

Dampak krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik golongan ekonomi atas, menengah maupun bawah. Pada masyarakat golongan ekonomi lemah lebih merasakan dampak krisis dibanding golongan ekonomi menengah dan atas. Masyarakat petani salah satu golongan masyarakat ekonomi lemah yang merasakan dampak krisis ekonomi tersebut. Pada umumnya masyarakat petani masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan. Keterbatasan ekonomi itu nampak pada tingkat pendapatan petani yang pada umumnya masih rendah. Memang ada petani yang dari segi ekonomi cukup berhasil, namun di samping jumlahnya tidak banyak juga keberhasilan itu lebih nampak pada mereka yang merangkap usaha lain.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat petani. Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas (Eko, 2004:32). Jadi dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan profil pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

Apa saja program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah daerah Di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui apa program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah daerah Di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

D. Kerangka Konsep

1. Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empwerment*”, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri”. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moelyarto, 1996).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development*. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Dalam kaitan ini Moeljarto (1996) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, yaitu meliputi :

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.
- d. Budaya kelembagaan ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom, dan mandiri yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
- e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, mencakup kelompok

penerima manfaat pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dari penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang. (Sunartiningsih Agnes, 2004:50)

Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakanya. (Sasmita, 1996 : 141) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini dipandang lebih luas dari hanya semata mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety*)

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan dalam konteks ini kemudian berkaitan erat dengan kondisi fisik dan mental seseorang. Namun selain nilai fisik ada pula nilai-nilai intrinsic dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotong royongan dan bagi Indonesia kebinekaan (Sasmita, 1996 : 144).

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan secara dinamis mengembangkan diri mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat mengandung arti adanya upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian upaya pemberdayaan haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Selanjutnya usaha pemberdayaan harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan tidak hanya menciptakan iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai seperti

kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan (Karta Sasmita Ginanjar, 1996 : 145).

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok, yakni:

- Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam aspek kebijakan dan program-program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya sendiri (Eko Sutoro, 2004 :76).

Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, akan terwujud keberdayaan masyarakat, yang memiliki unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada 3 aspek, yakni:

- Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- Memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian masukan berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah.

- Melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi (Eko Sutoro, 2004 :77).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibutuhkan beberapa akses yakni:

- Akses terhadap sumber daya
- Akses terhadap teknologi, yakni suatu kegiatan dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien
- Akses terhadap informasi pasar, termasuk penyediaan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan berusaha
- Akses terhadap sumber pembiayaan (Eko Sutoro, 2004 :78).

Sedangkan etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat pemerintahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

- Memahami aspirasi masyarakat (*responsip*)
- Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri
- Melakukan dialog dan memberikan informasi yang banyak namun terbaik bagi masyarakat
- Menciptakan instrumen dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada yang lemah (Eko Sutoro, 2004 :79).

Kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya atas dasar potensi, aspirasi, kewenangan, kelembagaan serta

prioritas kebutuhannya, maka akan terwujud kemandirian masyarakat sebagai wadah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

2. Aktor/Pelaku Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum dalam memahami strategi partisipatif, maka penting untuk dicermati siapa-siapa anggota masyarakat yang terlibat. Ini diperlukan untuk memberikan gambaran strategi partisipatoris dan mengidentifikasi parameter-parameter yang strategis dan metodologis.

Semua lembaga dan proyek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat harus menentukan siapa yang hendaknya diajak berpartisipasi. Kelompok sasaran atau yang disebut penerima (*beneficeries*) dalam prakteknya harus dirumuskan ulang, dengan mempertimbangkan perbedaan kelompok sosial yang diklasifikasikan atas dasar ekonomi, politik, etnik, agama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, area geografis, mata pencaharian, kepedulian terhadap isu-isu tertentu (Mudiyono, 2005 : 39).

Selanjutnya aktor/pelaku tidak terbatas pada kelompok sasaran saja, tetapi juga pihak luar misalnya pendamping, motivator termasuk pemerintah dan LSM harus juga terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Peran pihak luar pada mulanya adalah mendorong prakarsa partisipasi, tetapi tujuannya adalah untuk melimpahkan wewenang dan pengendalian yang lebih besar pada masyarakat.

Kaitannya dengan kelompok sasaran dalam pemberdayaan masyarakat miskin, metode partisipatif juga perlu dipilih atau disusun sedemikian sehingga, memasukkan pertimbangan strata sosial, hubungan sosial masyarakat, strata ekonomi, etnik, umur, jenis kelamin, area geografis, mata pencaharian, ketrampilan dll dari kelompok sasaran tersebut. Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan yang dipakai tersebut akan dapat tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, tidak terlepas juga peran/partisipasi pihak luar yaitu para pejabat formal dan informal masyarakat termasuk LSM untuk turut aktif dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Pihak luar harus memperhatikan dua hal, yang pertama menempatkan kaum miskin sebagai prioritas, kedua memusatkan perhatian pada mereka dan kebutuhannya menurut ukuran mereka sendiri dan bukan menurut pihak luar (Mudiyono, 2005 : 40).

3. Kondisi Ekonomi Petani

Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam struktur perekonomian nasional. Sektor ini relatif merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dalam aksi pembangunan. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk tergantung pada sektor pertanian (Yuliati Yayuk, 2003:238).

Fenomena kemiskinan masyarakat petani merupakan masalah yang cukup kompleks sekaligus merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Menurut Wolf (dalam Sunartiningsih, 2004:109) kompleksitas masalah yang dihadapi oleh petani di berbagai daerah di Indonesia kurang lebih menunjukkan hal yang sama. Di satu sisi petani diharapkan pada persoalan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti sandang, pangan, papan dan lain-lain (keperluan seremonial, pendidikan, kesehatan dan tuntutan-tuntutan lain); di sisi lain, petani harus tunduk pada keharusan-harusan yang dipaksakan pihak lain, terutama para pengusaha dan pedagang. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja petani sudah mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sempitnya lahan yang dimiliki dan besarnya biaya produksi yang harus ditanggung dalam sektor pertanian. Sebagian besar petani di Indonesia hanya mempunyai lahan yang sangat terbatas, bahkan ada kecenderungan jumlah pemilik lahan mengalami penurunan sejalan dengan masih adanya system pembagian warisan. Selain itu, kebijakan pemerintah tentang pencabutan subsidi pupuk pada beberapa tahun yang lalu telah semakin memberatkan petani dalam membiayai biaya produksi. Ini berarti pendapatan usaha tani semakin menurun.

Kondisi tersebut di atas yang menyebabkan masyarakat petani sekarang tidak berdaya menghadapi persaingan hidup yang semakin kompetitif. Masalah ini menjadi rumit untuk dicarikan solusi alternatifnya, mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha di luar pertanian yang sebenarnya dapat

dijadikan alternative untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, dirasa cukup mendesak untuk dilakukan usaha-usaha yang berorientasi untuk memberdayakan petani seiring dengan semakin besarnya tuntutan kebutuhan hidup dan ketaatnya persaingan hidup yang dihadapi oleh petani.

Berdasarkan beberapa penelitian dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian mengalami penurunan, terutama kalau lihat dari besarnya pendapat dari sektor pertanian dalam menopang kehidupan petani. Suyanto (1996) mencatat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (1977) di daerah Indramayu, Collier (1974) dan Nurmanaf (1980) juga menentukan gejala yang kurang lebih sama, dimana sejak adanya penetrasi bibit unggul, huller, traktor, sistem tebasan, dan semacamnya telah menyebabkan kesempatan kerja di desa makin berkurang. Untuk mencapai kebutuhan hidupnya yang dirasa semakin kompleks, masyarakat petani disamping tetap mengelola usaha-usaha di sektor pertanian, juga banyak yang mengembangkan usaha-usaha di luar sektor pertanian. Dalam setiap keluarga petani ditemukan ada tenaga kerja yang bekerja di luar sektor pertanian, hal ini menguatkan bahwa sektor pertanian tidak mampu lagi dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Peluang usaha di luar sektor pertanian yang ada di daerah pedesaan sebenarnya mempunyai prospek untuk dikembangkan. Di daerah pedesaan diasumsikan memiliki potensi yang dapat mendukung pengembangan sektor ini, baik yang berupa potensi wilayah, potensi sosial dan budaya, potensi kelembagaan maupun potensi sumber daya manusianya. Namun demikian, karena potensi tersebut belum dimanfaatkan

dengan baik maka usaha-usaha off-farm yang sudah dijalankan belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani (Sunartiningsih, 2004:110).

Memahami kondisi ketidakberdayaan masyarakat petani baik secara ekonomi maupun sosial yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan mereka, serta minimnya akses mereka pada pasar dan fasilitas lainnya, maka usaha-usaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat nampaknya mendesak untuk segera dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini jenis deskriptif kualitatif. Hakekat penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan jalan menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sekarang. (Nawawi, 2001; 67).

Bogdan dan Tailor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moleong, 2002:3).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan jalan menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada sekarang berdasarkan

fakta-fakta yang ada sekarang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenome-fenomena yang diselidiki (Kontjaraningrat, 1997:109).

Observasi dalam penelitian ini antara lain melakukan pengamatan terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau interview merupakan cara pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung antara antara peneliti dengan responden untuk tujuan atau tugas tertentu (Kontjaraningrat, 1997:129). Dengan teknik ini peneliti akan melakukan wawancara dengan sejumlah warga masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan (Kontjaraningrat, 1997:44). Data tersebut dapat diperoleh dari buku, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Unit Analisis

Menurut Moleong (2002:21), dalam penelitian kualitatif tidak ada sistem pengumpulan data dengan sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purpose sample*). Penelitian ini sumber data diperoleh dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan petani melalui wawancara dan dibantu dokumentasi sebatas perlu.

Dalam penelitian ini diambil 10 orang sebagai nara sumber yaitu:

- a. 4 orang aparat pemerintah
- b. 2 orang tokoh masyarakat
- c. 4 orang petani.

4. Analisa Data

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif analisis yaitu dengan cara pengumpulan data kemudian data tersebut dianalisa dari awal hingga akhir penelitian menggunakan cara :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk uraian yang telah direduksi/ dirangkum dengan memilih halaman mana yang pokok atau penting.

2. Display data

Agar dapat menguasai data penelitian dengan baik, data-data tersebut perlu dibuat matriks, grafik agar dicapai gambaran keseluruhan.

3. Kesimpulan

Data yang diperoleh disimpulkan dengan terus diperiksa apakah ada penambahan dengan masuknya data baru agar kesimpulan lebih

mengenai atau mendalam Lexy L. Moleong mengatakan untuk mendapatkan data secara absah dilakukan dengan pengecekan pada beberapa sumber dengan teknik triangulasi (Moleong, 2002:179)

4. Triangulasi

Dalam penelitian ini data yang telah dianalisis perlu diperiksa keabsahan. Uji keabsahan data bertujuan untuk mencapai kredibilitas penelitian. Teknik pemeriksaan data yang akan digunakan adalah triangulasi data. Hadari Nawawi (2001), menyatakan triangulasi data yang merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data yang telah dikumpulkan. Triangulasi data menurut (Lexy Moleong, 2002 : 15), yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai perbandingan / pengecekan terhadap data. Keuntungan menggunakan triangulasi adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih ada kekurangan. Cara yang dapat digunakan dalam triangulasi data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang dikumpulkan melalui waktu dan alat yang berbeda. Cara ini dapat ditempuh dengan jalan membandingkan data wawancara dengan hasil pengamatan. Triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber data dengan metode yang sama.